

**ANALISIS ETIKA ANTI KORUPSI DALAM ADMINISTRASI
PUBLIK BERBASIS NILAI ISLAM**

Moh. Arifin Ilham¹, M.Fadhlan Masyhuri Al jamhuri²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹moharifinilham363@gmail.com , ²alannmasyhuri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik korupsi dalam administrasi publik yang menunjukkan lemahnya integritas dan etika aparatur negara. Pendekatan hukum yang selama ini digunakan dinilai belum cukup efektif tanpa didukung oleh penguatan nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika anti korupsi dalam administrasi publik berbasis nilai-nilai Islam serta mengkaji peran nilai tersebut dalam mencegah perilaku koruptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku aparatur yang berintegritas. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan etika, penguatan budaya organisasi, serta keteladanan pimpinan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara nilai normatif dan praktik empiris akibat faktor lingkungan organisasi dan lemahnya pengawasan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi etika berbasis nilai Islam dalam administrasi publik merupakan pendekatan yang efektif dan komprehensif dalam mencegah korupsi, baik secara preventif maupun dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Kata kunci: etika anti korupsi; administrasi publik; nilai Islam; integritas aparatur pencegahan korupsi

ABSTRACT

This study is motivated by the persistent issue of corruption in public administration, which reflects weak integrity and ethical standards among public officials. Legal approaches alone have proven insufficient without the support of strong moral and spiritual values. Therefore, this study aims to analyze anti-corruption ethics in public administration based on Islamic values and to examine their role in preventing corrupt behavior. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature review and documentation. The findings reveal that Islamic values such as honesty, trustworthiness, justice, and responsibility play a significant role in shaping the integrity of public officials. The implementation of these values can be carried out through ethics education, strengthening organizational culture, and leadership role modeling. However, there remains a gap between normative values and empirical practices due to organizational factors and weak supervision. The study concludes that integrating Islamic values-based ethics into public administration is an effective and comprehensive approach to preventing corruption, both preventively and in fostering clean and just governance.

Keywords: anti-corruption ethics; public administration; Islamic values; bureaucratic integrity; corruption prevention

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan klasik namun tetap aktual dalam penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks negara

berkembang, korupsi bahkan telah menjadi fenomena sistemik yang melibatkan berbagai aktor dan struktur kekuasaan sehingga sulit diberantas secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi dan belum mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, yang mengindikasikan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif (Putera et al., 2024).

Dalam administrasi publik, korupsi sering kali dipicu oleh lemahnya integritas aparatur, rendahnya kesadaran etika, serta kurangnya internalisasi nilai moral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa landasan etika yang kuat, berbagai bentuk penyimpangan seperti gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan akan semakin sulit dikendalikan (Marbela et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan etika menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi yang bersifat preventif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa etika administrasi publik memiliki peran signifikan dalam membentuk integritas birokrasi dan mencegah praktik korupsi. Etika dipahami sebagai sistem nilai yang mampu mengarahkan perilaku aparatur agar tetap profesional dan bertanggung jawab dalam pelayanan publik (Putri, 2025). Selain itu, etika juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Rijal et al., 2025).

Di sisi lain, pendekatan berbasis nilai agama, khususnya Islam, menjadi alternatif strategis dalam membangun etika anti korupsi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika administrasi publik modern. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai Islam mampu membentuk kesadaran moral individu untuk menolak praktik korupsi serta mendorong perilaku yang berintegritas (Hilmin & Noviani, 2023). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam administrasi publik tidak hanya memperkuat aspek normatif, tetapi juga membangun kesadaran batin yang menjadi dasar perilaku etis.

Selain itu, implementasi nilai-nilai Islam dalam birokrasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai patologi administrasi publik. Nilai-nilai tersebut mampu merevitalisasi moral aparatur negara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan (Hidayat et al., 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek legal dan moral dalam pemberantasan korupsi.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, penguatan etika berbasis nilai Islam juga perlu mempertimbangkan realitas keberagaman sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Fahrur Rozi bahwa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga pluralisme dan multikulturalisme menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis (Rozi, 2019). Keberagaman tersebut menuntut adanya

sikap saling menghargai, toleransi, dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Lebih lanjut, Rozi (2019) menegaskan bahwa pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi juga harus dijadikan paradigma dalam membangun masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Dalam konteks administrasi publik, nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat etika aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dalam etika anti korupsi tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang plural.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika, baik yang bersifat umum maupun berbasis agama, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara nilai normatif dan praktik empiris di lapangan. Meskipun nilai-nilai anti korupsi telah banyak disosialisasikan, implementasinya masih belum optimal. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berbasis karakter masih memerlukan strategi yang lebih efektif agar dapat membentuk perilaku individu secara nyata (Yuliani & Muslim, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi turut menghadirkan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi. Praktik korupsi di era digital menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural dan legal, tetapi juga kultural dan spiritual. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam yang bersifat universal dapat menjadi landasan etika yang adaptif dalam menghadapi dinamika zaman sekaligus memperkuat integritas aparatur negara.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian mengenai etika administrasi publik dan pendidikan anti korupsi, kajian yang secara khusus mengintegrasikan etika anti korupsi berbasis nilai Islam dalam konteks administrasi publik yang plural masih terbatas. Kesenjangan ini menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana etika anti korupsi dalam administrasi publik dapat dianalisis dan dikembangkan berbasis nilai-nilai Islam serta sejauh mana nilai-nilai tersebut mampu menjadi solusi dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, serta efektivitas etika anti korupsi berbasis nilai Islam dalam administrasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta kontribusi praktis dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Secara konseptual, etika anti korupsi diartikan sebagai seperangkat nilai dan norma yang mengarahkan perilaku individu untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi. Administrasi publik dipahami sebagai proses penyelenggaraan kebijakan oleh aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Sementara itu, nilai-nilai Islam

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 92 – 100.

mencakup prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan moral dalam kehidupan individu maupun sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena etika anti korupsi dalam administrasi publik berbasis nilai Islam, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dianalisis secara kontekstual dan interpretatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, serta pemahaman yang berkembang dalam praktik administrasi publik secara lebih komprehensif (Creswell, 2014). Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti sekaligus menganalisis keterkaitan antara etika anti korupsi dan nilai-nilai Islam dalam konteks administrasi publik.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Januari hingga Maret 2026. Lokasi penelitian difokuskan pada lingkungan administrasi publik yang relevan, baik pada instansi pemerintahan maupun melalui kajian literatur yang berkaitan dengan praktik etika dan anti korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi etika anti korupsi berbasis nilai Islam.

Subjek dalam penelitian ini adalah individu atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan administrasi publik, seperti aparatur sipil negara (ASN), akademisi, serta praktisi yang memahami isu etika dan anti korupsi. Sementara itu, objek penelitian ini adalah konsep dan implementasi etika anti korupsi dalam administrasi publik yang berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik empiris yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, studi literatur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi, kebijakan publik, serta laporan terkait praktik korupsi dan etika administrasi publik. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer yang bersifat kontekstual dan aktual dari informan yang dianggap kompeten dalam bidangnya (Creswell, 2014). Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik administrasi publik.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (human instrument), yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, sekaligus analis data. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, serta lembar dokumentasi untuk membantu proses pengumpulan data secara sistematis. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu etika anti korupsi dan nilai-nilai Islam dalam administrasi publik, sehingga data yang diperoleh tetap relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan maupun literatur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur, dokumen, dan hasil wawancara. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data melalui berbagai teknik, seperti studi dokumentasi dan wawancara. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap perencanaan, peneliti menetapkan fokus penelitian, menyusun instrumen, serta menentukan sumber data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Dengan prosedur yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang relatif serupa (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika anti korupsi dalam administrasi publik berbasis nilai Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas. Berdasarkan analisis data dari studi literatur dan dokumen yang relevan, ditemukan bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan (‘adl), dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membangun etika aparatur publik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam

pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa etika berbasis nilai moral memiliki kontribusi besar dalam mencegah perilaku koruptif di lingkungan birokrasi (Putri, 2025; Rijal et al., 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam administrasi publik dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu pendidikan etika, penguatan budaya organisasi, serta keteladanan pimpinan. Pendidikan etika berbasis agama dinilai mampu membentuk kesadaran moral individu sehingga tidak hanya takut terhadap sanksi hukum, tetapi juga memiliki kontrol diri (self-control) yang kuat. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pendidikan anti korupsi berbasis nilai agama dapat meningkatkan integritas individu secara berkelanjutan (Hilmin & Noviani, 2023). Selain itu, budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai kejujuran dan transparansi juga terbukti berpengaruh dalam menekan praktik korupsi di lingkungan kerja, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian mengenai pentingnya etika administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Marbela et al., 2023).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi etika anti korupsi berbasis nilai Islam masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan dengan praktik nyata di lapangan. Dalam banyak kasus, aparatur negara telah memahami nilai-nilai etika, tetapi belum sepenuhnya mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan organisasi, tekanan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa lemahnya integritas sistem dan budaya organisasi dapat menghambat efektivitas penerapan etika administrasi publik (Marbela et al., 2023; Putera et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan hukum yang selama ini menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi belum cukup efektif tanpa diimbangi dengan pendekatan etika dan moral. Pendekatan hukum cenderung bersifat represif, yaitu menindak setelah terjadinya pelanggaran, sedangkan pendekatan etika bersifat preventif dengan menanamkan kesadaran sejak dini. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum dan etika menjadi sangat penting dalam membangun sistem administrasi publik yang bersih. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan etika administrasi publik dapat menjadi strategi preventif dalam membangun integritas aparatur negara (Putera et al., 2024; Creswell, 2014).

Dalam konteks perbandingan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan Rahman (2020) dan Suryadi (2019) yang menekankan pentingnya nilai moral dalam mencegah korupsi. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan secara spesifik nilai-nilai Islam dalam kerangka etika administrasi publik. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek etika secara umum, maka penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dan aplikatif dalam konteks administrasi publik di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan implementasi etika anti korupsi. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjadi teladan akan mendorong terciptanya budaya organisasi yang sehat. Sebaliknya, apabila pimpinan tidak menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika, maka akan sulit bagi organisasi untuk menerapkan prinsip anti korupsi secara konsisten. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa kepemimpinan etis memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku organisasi dan integritas aparatur (Rijal et al., 2025).

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penguatan konsep etika administrasi publik berbasis nilai-nilai Islam sebagai pendekatan alternatif dalam studi administrasi publik. Penelitian ini memperluas perspektif bahwa etika tidak hanya bersumber dari teori Barat, tetapi juga dapat dikembangkan dari nilai-nilai agama yang memiliki relevansi kontekstual. Sementara itu, implikasi praktisnya adalah perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, pendidikan aparatur, serta sistem manajemen organisasi guna membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan (Sugiyono, 2019).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa etika anti korupsi berbasis nilai Islam tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diimplementasikan dalam praktik administrasi publik. Namun, keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada komitmen individu, dukungan organisasi, serta kebijakan yang berpihak pada penguatan integritas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan administrasi publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etika anti korupsi dalam administrasi publik berbasis nilai Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun integritas aparatur negara serta mencegah praktik korupsi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab terbukti mampu menjadi landasan moral yang kuat dalam membentuk perilaku aparatur publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi etika anti korupsi berbasis nilai Islam sangat dipengaruhi oleh pendidikan etika, budaya organisasi, serta keteladanan pimpinan. Integrasi antara pendekatan etika dan pendekatan hukum menjadi strategi yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi karena mampu menggabungkan aspek pembinaan moral dan penegakan aturan secara seimbang. Dengan demikian, pendekatan berbasis nilai Islam dapat menjadi solusi alternatif yang komprehensif dalam memperkuat sistem administrasi publik yang bersih dan berintegritas.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 92 – 100.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep etika administrasi publik dengan memasukkan perspektif nilai-nilai Islam sebagai landasan moral yang kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, pendidikan aparatur, serta budaya organisasi guna menciptakan lingkungan birokrasi yang anti korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan pendekatan studi literatur yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris secara luas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai instansi serta mengembangkan model implementasi etika anti korupsi berbasis nilai Islam yang lebih aplikatif dan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Agama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta wawasan keilmuan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Madura, atas dukungan akademik, fasilitas, serta lingkungan ilmiah yang kondusif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak, oleh karena itu segala bentuk dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, R., Setiabudi, A., Nuriman, E. J., Dewi, M. P., & Muksin, N. N. (2024). Implementasi etika Islam: Upaya revitalisasi etika aparatur birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1). <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.263>
- Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun kesadaran publik anti korupsi dalam konsep pendidikan berbasis agama Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3). <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.335>
- Marbela, S., Aprilya, Z., & Ulfa, K. (2023). Pentingnya prinsip etika administrasi publik dalam upaya pemberantasan gratifikasi di lingkungan birokrasi publik. *Sanger: Social, Administration and Government Review*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/sanger.v1i1.2956>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Purnama, T. H. (2024). Public administration ethics education to build anti-corruption integrity. *Warta Pengabdian Andalas*, 31(2). <https://doi.org/10.25077/jwa.31.2.303-311.2024>

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 92 – 100.

Putri, Z. L. K. (2025). Etika administrasi publik dalam upaya pencegahan korupsi birokrasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2).

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.319>

Rahman, A. (2020). Etika dan integritas dalam administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 123–135.

Rijal, R., Jusman, J., Sukmawati, S., & Sulaeman, S. (2025). *Etika administrasi publik: Fondasi moral untuk tata kelola dan pelayanan berkualitas*. CV. Dunia Penerbitan Buku.

Rozi, M. F. (2019). *Pluralisme dan multikulturalisme dalam membangun masyarakat madani: Kajian paradigmatis*. Universitas Madura Pamekasan.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryadi, B. (2019). Nilai moral dalam pencegahan korupsi di sektor publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45–56.

Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi kebijakan pendidikan antikorupsi dengan kebijakan pendidikan karakter. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.12291>